



**EVALUASI KINERJA DPR MASA SIDANG I
DAN MASA SIDANG II TAHUN
PERSIDANGAN 2015 – 2016, SERTA
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2015**

Konferensi Pers

MINGGU, 20 DESEMBER 2015

JL. MATRAMAN RAYA 32 B, JAKARTA TIMUR

Kehilangan Fokus, Makin Kurang ber-Etika

Evaluasi Kinerja DPR Tahun Kedua (2015 – 2016)

MS I dan MS II

Kehilangan Fokus, Makin Kurang ber-Etika

Evalusi Kinerja DPR Tahun Kedua (2015 – 2016) MS I dan MS II

DPR memasuki Masa Persidangan II 2015 – 2016 dengan membuka Masa Sidang (MS) I pada 14 Agustus, dan yang berlangsung sampai dengan 30 Oktober 2015. Pada masa sidang ini, tak banyak capaian dihasilkan oleh DPR dalam berbagai fungsi dan tugasnya. MS II pun telah dilalui oleh DPR pada 16 November – 18 Desember 2015. Seperti pada masa sidang lalu, capaian fungsi-fungsi utama DPR tak banyak dihasilkan. Bahkan, pada penghujung akhir masa sidang ini, terungkap melalui proses persidangan di MKD untuk perkara dugaan pelanggaran etika oleh Ketua DPR, Setya Novanto, betapa kepentingan pribadi dan/atau golongan telah menyelimuti DPR. Semua ini nampak menandai bahwa DPR kehilangan fokus dan makin kurang beretika dalam menjalankan peran terhormat sebagai perwakilan rakyat.

A. MS I: Tak Ada Terobosan

- Memulai tahun persidangan ke-2, pada Masa Sidang (MS) I DPR tak melakukan capaian berarti yang memberi tanda-tanda perbaikan kinerjanya pada masa persidangan pertama. Tak ada terobosan penting ditunjukkan oleh DPR. Empat isu menonjol mewarnai masa sidang ini dalam hal pelaksanaan fungsi **pengawasan**, yaitu: proses seleksi capim KPK, dan komisioner KY, pembentukan pansus Pelindo 2, dan pembentukan Panja Kebakaran Hutan dan Kabut Asap (8 Oktober). Namun perlu dicatat, Panja Kebakaran Hutan dan Kabut Asap ini tidak jelas kelanjutannya karena para inisiator Panja mengusulkan perubahan Panja menjadi penggunaan hak interpelasi yang ternyata ditolak oleh Sidang Paripurna DPR (30 Oktober). Dalam pelaksanaan fungsi **legislasi**, tak ada capaian legislasi dari RUU Prioritas 2015. Sebagian kecil tengah dalam proses harmonisasi; sebagian kecil lainnya berada pada tahap pembicaraan tingkat 1. Dalam pelaksanaan fungsi **anggaran**, terlihat DPR memberikan rekomendasi umum penyerapan anggaran Semester II tahun 2015, dan menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2014, serta membahas RUU menjadi UU APBN TA 2016. Dalam kepatuhan pada, dan penegakan untuk **Kode Etik**, DPR terlihat kurang menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran etika oleh MKD secara sungguh-sungguh. Pada masa ini, seperti pada masa-masa sidang lalu, DPR juga tidak memberikan kejelasan tentang hasil **serap aspirasi** yang digali oleh masing-masing anggota DPR di Dapil pada masa reses.
- Harus dicatat, DPR menyisakan 37 RUU Prioritas 2015 dari masa persidangan I; sementara DPR harus menyusun RUU Prioritas 2016. Demikian juga, DPR belum memberikan laporan kinerja atas 37 Panja Pengawasan. Untuk penegakan etika, MKD masih harus menyelesaikan 17 perkara dugaan pelanggaran etika oleh anggota DPR.

B. MS II: Kehilangan Arah

- MS II DPR disuasanai oleh makin santernya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Ketua DPR, Setya Novanto. Ini terlihat berpengaruh dalam kinerja DPR. Tak terlihat geliat, apalagi semangat, anggota DPR secara sendiri-sendiri maupun dalam AKD menunaikan kewajibannya menjalankan fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam kerangka perwakilan rakyat. Beberapa agenda sidang paripurna tidak terlaksana. Terkesan kuat, DPR kehilangan arah secara substantif. Dalam fungsi **legislasi**, DPR masih tetap berkuat pada proses merampungkan RUU mejadi UU, dan hanya satu UU dituntaskan. Dan, sangat tak bernalar, DPR menambah 1 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2015 pada penghujung akhir tahun 2015 (15 Desember) hingga total menjadi 40 RUU Prioritas 2015. Sementara itu, DPR sudah harus dituntut untuk menyusun Prolegnas Prioritas 2016. Dalam fungsi **pengawasan**, satu peran menonjol yang ditampilkan, yaitu: Pansus Pelindo 2 yang merampungkan kerjanya dengan menghasilkan rekomendasi yang keras, dan bahkan terlalu jauh dari wewenangnya, yaitu: pemecatan RJ. Lino dari jabatan Dirut Pelindo 2, dan pemberhentian Rini Suwandi sebagai Menteri BUMN. DPR juga menyelesaikan proses *fit and proper test* untuk lima (5) komisioner KPK baru. Dalam fungsi **anggaran**, DPR kurang menunjukkan tanda-tanda yang berarti bagi persiapan untuk pembahasan RAPBNP 2016. Proses dan hasil **serap aspirasi** oleh para anggota DPR tak kunjung terbukti telah memberikan penegasan bagi peran perwakilan rakyat yang diemban mereka. Ini makin dipertegas dengan penyajian faktuil dalam proses penegakan Kode Etik DPR oleh dan dalam **persidangan MKD** atas perkara aduan tentang dugaan perilaku tak terpuji Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus “papa minta saham” terkait dengan soal perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Pada proses ini, kepentingan pribadi dan kelompok terlihat sangat dibela oleh sejumlah anggota DPR dalam MKD, dan bahkan dengan “beragam cara dan alasan” yang mengabaikan fakta, obyektivitas, dan bahkan nalar dan akal sehat. DPR seperti telah kehilangan “roh” perwakilan rakyat.
- MS II sepertinya makin membuktikan saja bahwa DPR secara kasus per kasus maupun dalam keseluruhannya kurang mencerminkan peran perwakilan rakyat yang diembannya. Beragam sikap, cara dan argumentasi yang ditunjukkan oleh anggota maupun Fraksi di DPR nampak tak menunjukkan kesatuan visi dan misi dalam menegakkan kehormatan DPR. Rakyat, kepentingan dan aspiranya, terasa jauh dari fokus, suasana, dan apalagi perjuangan, dari mereka yang secara konstitusional menyandang predikat, dan mengemban peran, perwakilan rakyat.

C. Rekomendasi

- Dalam aspek apapun DPR harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa badan perwakilan ini masih ada kehendak untuk mendapatkan kepercayaan publik. Hanya dengan cara ini, DPR akan memperoleh kehormatannya.
- Waktu yang tersedia untuk DPR tidak banyak. DPR sudah menyelesaikan 2 masa sidang pada masa persidangan 2015-2016. Sementara diketahui, DPR membawa utang 37 RUU Prioritas 2015; dan masih harus menyusun RUU Prioritas 2016. Dua masa sidang yang tersedia hingga penutupan masa persidangan 2015-2016 pada bulan Juli 2016, tampaknya tak akan cukup bagi DPR menyelesaikan target-target kinerja sendiri. Karena itu, diperlukan komitmen dan fokus pada kewajiban dan tugas DPR untuk dapat menggunakan waktu yang tersedia dengan hasil dan capaian yang maksimal.

Jakarta, 20 Desember 2015

FORMAPPI

Refleksi Akhir Tahun 2015

**DPR KHIANATI KEPERCAYAAN
RAKYAT**

Refleksi Akhir Tahun 2015

DPR KHIANATI KEPERCAYAAN RAKYAT

Sepanjang tahun 2015, DPR berproses secara melorot yang ditandai dengan: konsolidasi politik pada awal tahun yang membawa optimisme bagi peluang untuk kinerja yang memadai; namun tak menampilkan peningkatan kuantitas dan pengembangan kualitas kinerja pada pertengahan tahun; dan malahan terpuruk secara fungsional dan etik pada penghujung akhir tahun.

Dipilih karena Dipercaya

DPR RI adalah satu-satunya badan pemerintahan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia yang membawa mandat mewakili rakyat. Karena itu, keanggotaannya dipilih secara langsung oleh rakyat. Melalui wadah Partai-Partai Politik, anggota-anggota DPR mewakili rakyat untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan pemerintah oleh Presiden benar-benar diabdikan untuk memajukan dan memakmurkan seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Dalam perspektif inilah terkandung makna utama bahwa sejak seseorang dinyatakan terpilih dan disumpah sebagai anggota DPR, sejak saat itu juga dia mengembankan kepercayaan publik (*public trust*). Anggota DPR dipilih karena dipercaya.

Agar tidak luntur dan hilang, kepercayaan publik itu harus dirawat dan diperkokoh oleh anggota DPR secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Panduan konstitusional, moral dan etik, serta prosedural dan teknis telah disediakan bagi DPR untuk merawat kepercayaan publik itu. Intinya, setiap anggota DPR harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri-sendiri dan kelompok. Untuk membuktikan itu, setiap anggota DPR harus berkinerja dengan melaksanakan fungsi dan tugasnya secara kompeten, berkapasitas, dan bertanggungjawab (teruji), dan yang didukung oleh perilaku dan tindakan yang tak tercela (terpuji).

Tanpa Prestasi dan Tercela

Berdasar pada perspektif itu, dan evaluasi secara mendalam penyelenggaraan peran perwakilan rakyat melalui pelaksanaan fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPR sepanjang tahun ini, FORMAPPI menilai bahwa DPR telah bekerja tanpa menghasilkan prestasi dan, bahkan dengan, dicemari tindakan dan perilaku tercela oleh sejumlah anggota dan pimpinannya.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR hanya menghasilkan tiga dari 40 RUU Prioritas 2015. Atau dengan kata lain, kemampuan legislasi DPR hanya 7,5 persen. Dua UU yang dihasilkan basisnya adalah Peraturan Pemerintahan Pengganti UU (Perppu), yaitu: tentang Pilkada, dan tentang Pemda, dan hanya satu RUU Prioritas yang dihasilkan menjadi UU yakni tentang Penjaminan. Di luar itu, DPR menghasilkan 13 UU Kumulatif Terbuka. Ini adalah prestasi terburuk yang pernah dialami DPR pasca-Reformasi.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR memang menyelesaikan tugas membahas dan menyetujui (R)APBNP 2015, dan (R)APBN 2016. Namun, tak terlihat pengaruh substantif DPR dalam tekanan-tekanannya memperjuangkan suara dan aspirasi rakyat dalam proses

pembahasan dan penetapan APBNP dan APBN itu. Dari sisi penganggaran, DPR justru terkesan mengutamakan kepentingan sendiri melalui alokasi anggaran rumah aspirasi, pembangunan tujuh mega proyek DPR, dana pembangunan dapil, dan kenaikan tunjangan anggota DPR.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melakukan banyak Rapat Kerja (Raker), membentuk banyak Panitia Kerja (Panja) dan Panitia Khusus (Pansus). Demikian juga, DPR telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Namun, Raker menghasilkan rekomendasi lunak kepada Pemerintah; dari 40 Panja, hanya 3 Panja selesai bekerja (7.3 persen), dan sisanya tak jelas kerja maupun hasil-hasilnya; dan, dari puluhan ribuan temuan BPK, hanya sedikit yang ditindaklanjuti.

Sejumlah anggota dan pimpinan DPR terduga dan terbukti melakukan pelanggaran etika (Kode Etik DPR). Tercatat 29 perkara melibatkan anggota, dan 2 perkara melibatkan pimpinan DPR di MKD. Dari 29 perkara anggota itu, MKD telah membuat keputusan terhadap 8 perkara, membatalkan 1 perkara dan tersisa 20 perkara untuk diselesaikan. Sementara dari 2 perkara pimpinan DPR, MKD memutuskan 1 perkara (*kasus Trumpgate*), dan tidak memutuskan 1 perkara lainnya (skandal '*papa minta saham*').

Di luar sangkaan dan/atau aduan pelanggaran etika yang sudah masuk di MKD, sejumlah tindakan dan perilaku tak layak oleh anggota dan pimpinan DPR sebagai pejabat tinggi negara dipertontonkan di hadapan publik. Ini terkait dengan peristiwa mutakhir persidangan MKD yang memeriksa dan mengadili perkara aduan pelanggaran Kode Etik oleh Ketua DPR, Setya Novanto, dalam perkara yang dikenal dengan "papa minta saham" (kasus perpanjangan kontrak karya PT. Freeport Indonesia). Bahkan MKD yang peran, fungsi dan tugasnya adalah merawat dan menegakkan marwah, harkat dan martabat DPR, terlihat justru disalahgunakan untuk melindungi dan membentengi kepentingan-kepentingan diri dan kelompok anggota DPR.

Dinilai dari sisi pembiayaan, buruknya kinerja itu terlalu mahal untuk alokasi anggaran DPR sebesar Rp. 5 triliun lebih dalam APBNP 2015. Ini sama saja DPR telah mengkhianati kepercayaan rakyat, dan menistakan sendiri kehormatannya.

Anomali Yang Menghambat

DPR yang hadir tanpa mau menegakkan kehormatannya, dan tanpa upaya merawat kepercayaan rakyat, akan menjadi DPR yang mengingkari semua alasan maknawi bagi keberadaannya. Ini adalah bencana untuk Indonesia yang tengah dengan sungguh-sungguh membangun tata kelola pemerintahan presidensiil yang berkedaulatan rakyat. Jika DPR tak dipercaya oleh publik, ini menghilangkan perwakilan rakyat; dan, jika DPR tak terhormat, dia membiarkan pemerintahan menjadi timpang, kotor dan tak demokratis. DPR yang tak dipercaya dan tak terhormat adalah anomali yang menghambat pengembangan dan penyelenggaraan sistem demokrasi perwakilan.

Membangun Kepemimpinan Berwibawa

DPR harus bangkit dari situasi terpuruk itu. Mundurnya Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR periode 2014 – 2019, tidak akan serta merta menegakkan kehormatan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap DPR. Apalagi Setya Novanto yang telah

diketahui oleh publik bersalah melalui proses persidangan di MKD, ternyata masih tetap bercokol sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. Kedua keutamaan yang membentuk martabat dan citra DPR itu harus dibangun atas dasar komitmen teguh untuk penyelenggaraan perwakilan rakyat yang dinyatakan secara konsisten dan konsekuen dalam tindakan dan perilaku anggota DPR yang terpuji, dan pelaksanaan fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPR yang teruji.

Banyak hal harus dilakukan oleh DPR untuk membuktikan kemampuannya memenuhi dua keutamaan ini. Tetapi, satu hal yang akan menjadi pertanda penting untuk pembuktian itu dalam jangka dekat ini adalah pemanfaatan pengunduran diri Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR sebagai momen strategis untuk menata dan meniti kepemimpinan baru DPR yang berwibawa.

Kepemimpinan DPR berwibawa manakala terbukti mau berusaha dan mampu bertindak memberikan arah, bersedia memandu, serta berani mengambil tanggungjawab atas kinerja seluruh unsur dan komponen kelembagaannya demi memenuhi mandat mewujudkan peran perwakilan rakyat yang jujur, efisien dan efektif.

Ditunggu kepemimpinan baru untuk membuat terobosan-terobosan bermutu yang mampu mengentaskan DPR dari keterpurukannya saat ini.

Jakarta, 20 Desember 2015

FORMAPPI

LIPUTAN MEDIA

Formappi: DPR Sibuk Memperjuangkan Anggaran untuk Kepentingan Sendiri

Minggu, 20 Desember 2015 | 13:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang 2015 dinilai buruk.

Berdasarkan catatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), dari 40 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2015, hanya tiga yang diselesaikan menjadi Undang-undang.

Ketiga UU itu yakni UU Pemilihan Kepala Daerah, UU Pemerintahan Daerah dan UU Penjaminan.

"Ini artinya kemampuan legislasi DPR hanya 7,5 persen," kata peneliti Formappi Abdul Sahid di kantornya, Minggu (20/12/2015).

Dalam menjalankan fungsi anggaran, keberpihakan DPR terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dipertanyakan.

Mereka justru sibuk memperjuangkan anggaran untuk kepentingan diri sendiri, baik di dalam APBN-P 2015 maupun APBN 2016.

"Seperti anggaran rumah aspirasi, pembangunan tujuh megaproyek DPR, dana pembangunan dapil dan kenaikan tunjangan anggota DPR," kata dia.

Fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah juga kurang maksimal. Ia mencontohkan, Badan Pemeriksa Keuangan selama ini telah menyerahkan hasil audit atas kinerja pemerintahan kepada DPR.

"Namun, raker hanya menghasilkan rekomendasi lunak kepada pemerintah. Dari 40 panja, hanya tiga panja yang selesai bekerja, dan sisanya tidak jelas," kata dia.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/12/20/13180701/Formappi.DPR.Sibuk.Memperjuangkan.Anggaran.untuk.Kepentingan.Sendiri>

Formappi: Kinerja Legislasi DPR Di Bawah Novanto Terburuk Sejak Reformasi!

Minggu 20 Dec 2015, 14:16 WIB

Jakarta - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai kinerja legislasi DPR hingga masa sidang II tahun 2015-2016 sangat rendah. Bahkan, kinerja legislasi DPR periode ini merupakan yang terburuk sejak pasca Reformasi.

Dalam pelaksanaan legislasi, DPR yang dipimpin Setya Novanto hanya tiga undang-undang yang dihasilkan dari 40 RUU Prioritas 2015. Tiga UU tersebut adalah UU Pilkada, UU Pemda, dan UU Penjaminan.

Sementara dari kumulatif terbuka, DPR menghasilkan 13 UU seperti antara lain Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Polandia tentang kerja sama di bidang Pertahanan.

"Ini prestasi terburuk yang dikerjakan DPR selama pasca Reformasi. Kami mencatat baru kali ini, hanya tiga UU sejak 1999. Dengan kata lain, kemampuan legislasi DPR hanya 7,5 persen," ujar Peneliti Formappi Abdul Sahid di kantornya, Jl Matraman Raya, Jakarta Timur, Minggu (20/12/2015).

Dia menambahkan, proses persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Setya Novanto berpengaruh terhadap kinerja DPR. Tak ada keseriusan, semangat dewan menjalankan fungsinya di sektor legislasi.

"Anggota DPR jalan-jalan sendiri, beberapa agenda sidang paripurna tidak terlaksana. Terkesan, DPR kehilangan arah secara substantif," tuturnya.

Terkait kinerja anggaran, DPR dinilai bisa menyelesaikan tugas pembahasan dengan menyetujui RAPBN-P 2015 dan RAPBN-P 2016. Namun, belum ada pengaruh substantif DPR sesuai peran lembaganya yang mestinya menyampaikan aspirasi rakyat. Misalnya, yaitu dengan proyek pembangunan 7 mega proyek DPR.

"Dari sisi anggaran, DPR justru terkesan utamakan kepentingan sendiri lewat alokasi anggaran rumah aspirasi, dana pembangunan dapil, kenaikan tunjangan gaji anggota," sebutnya.

Dari kinerja pengawasan, Formappi mencatat DPR sudah melakukan banyak rapat kerja (Raker), membentuk banyak Panitia Kerja (Panja) dan Panitia Khusus (Pansus). Tapi, dari 40 Panja yang dibentuk, baru 3 Panja yang selesai bekerja.

"Baru 7,3 persen dan sisanya tak jelas ke mana hasilnya itu," sebutnya.

Peneliti senior Formappi lain, M. Djadidjono menyebut buruknya kinerja DPR ini jelas tak sebanding dengan alokasi anggaran sebesar lebih Rp 5 triliun di APBN-P 2015. Bila tak dijaga dan diperhatikan, kepercayaan rakyat akan semakin runtuh.

"Ini sama saja DPR mengkhianati kepercayaan rakyat, dan menistakan sendiri kehormatannya. Bila enggak mau menjaga kehormatannya, DPR tak dipercaya publik, menghilangkan perwakilan rakyat," ujar Djadidjono.

(hat/bag)

<http://news.detik.com/berita/3100538/formappi-kinerja-legislasi-dpr-di-bawah-novanto-terburuk-sejak-reformasi>

Baleg DPR Akui Capaian Legislasi 2015 Rendah

Minggu, 20 Desember 2015 21:59 WIB

Jakarta, HanTer - Badan Legislasi (Baleg) mengakui jika capaian legislasi DPR untuk tahun 2015 rendah seperti apa yang disampaikan Formappi terkait masalah kinerja legislasi.

"Saya tidak bisa menyangkal apa yang telah disampaikan (Formappi) tersebut memang benar adanya seperti itu, namun perlu diketahui bahwa tidak tercapainya legislasi ini merupakan konsekuensi revisi UU MD3 yang tidak memberikan ruang bagi Baleg untuk melakukan penyusunan, dan itu juga merupakan salah satu penyebabnya," kata Wakil Ketua Baleg DPR, Firman Soebagyo kepada *Harian Terbit*, Minggu (20/12/2015).

Namun dari adanya konsekuensi dari UU MD3 soal Legislasi, Firman mengaku pernah menyampaikan dalam setiap moment seperti ditingkat rapat Pimpinan DPR dan Bamus bahwa tidak diberikannya ruang Baleg untuk melakukan penyusunan maka semua penyusunan naskah akademik (NA) dan draf RUU diserahkan ke Deputi perundang-undangan yang mana hal itu menyebabkan semua menjadi lamban dan Baleg DPR sudah mengusulkan untuk segera dilakukan kerjasama dengan Perguruan tinggi dan lembaga-lembaga tertentu yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas untuk penyusunan NA dan draf RUU.

"Karena keterbatasan ruang dan tatib dari UU MD3 itu kami (Baleg) merasa perlu adanya revisi dari UU tersebut agar Baleg dapat leluasa menyusun agar RUU itu bisa rampung dan bisa menjadikan UU," tutur politikus P. Golkar ini.

Terkait dengan pernyataan calon Ketua DPR terpilih pengganti Setya Novanto yakni Ade Komarudin yang akan memangkas jatah kunker anggota DPR dengan memaksimalkan kerja dewan dalam legislasi, Firman sebagai pimpinan Baleg menyambut baik hal itu dan berharap hal itu bisa menjadi vitamin tambahan agar DPR bisa lebih produktif kembali dalam menyelesaikan soal legislasi.

"Jika memang benar adanya dari Ketua DPR baru akan hal seperti itu kami patut apresiasi dan menunggu janji beliau agar kerja legislasi DPR tercapai sesuai kesepakatan prolegnas 2016 serta 2015 yang masih kita sisakan dimasa sidang lalu," tutup Firman yang jug anggota komisi IV DPR.

Sebelumnya, kinerja legislasi DPR periode ini yang rendah menjadi sorotan dan kritikan. Efektivitas kunjungan setiap anggota dewan saat reses harus dioptimalkan. Selain itu, kunjungan kerja ke luar negeri yang tak penting wajib dikurangi.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyebut, banyak kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan DPR sebenarnya tak mendesak.

"Itu wajib, harus dikurangi. Harus itu. Mengacu masa sidang I dan II sebelum reses ini, agenda kunker ke luar negeri ini yang nggak penting, nggak mendesak," ujar Lucius di kantor Formapp, Minggu (20/12/2015).

Lucius pun menyinggung Ade Komarudin terkait janji mengurangi kunker ke luar negeri. Usai paripurna, dua hari lalu, Ade berjanji bila resmi menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto, maka dirinya akan meningkatkan produktivitas legislasi DPR. Salah satunya dengan mengurangi kunker ke luar negeri.

Menurut dia, janji ini mesti direalisasikan. Namun, bila hanya dari pernyataan Ade Komarudin, hal ini bakal sulit terwujud.

"Itu bukan keputusan Akom (Ade Komarudin, red) semata. Meskipun dia punya peranan. Tapi, butuh peran semua fraksi di DPR, secara stimultan," katanya.

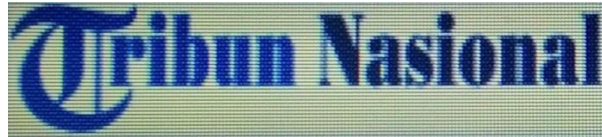
Sementara, soal kunker ketika reses juga mesti menjadi catatan. Waktu dua pekan untuk reses dinilai cukup.

Namun, pasca reses tak ada hasil laporan yang dilakukan anggota dewan. Padahal, ini penting agar rakyat bisa melihat upaya yang dilakukan anggota dewan secara transparan.

"Ini belum transparan. Belum sama sekali ada itu. Harusnya prosedur laporan itu diketahui publik," tuturnya.

(Luki)

<http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/2015/12/20/50988/65/25/Baleg-DPR-Akui-Capaian-Legislati-2015-Rendah>



Formappi Anggap Konyol Langkah Golkar Tempatkan Novanto Sebagai Ketua Fraksi

Minggu, 20 Desember 2015 12:45 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan [Partai Golkar](#) menempatkan mantan Ketua DPR [Setya Novanto](#) sebagai ketua fraksi, dipandang sebagai tindakan memalukan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) [Sebastian Salang](#).

Menurut Salang, dalam sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah menyatakan Novanto melakukan pelanggaran berat.

Sehingga dianggap konyol bila partai berlogo pohon beringin tersebut kembali memberikan kepercayaan kepada Novanto.

"Di MKD mereka menyatakan perbuatan Novanto sebagai pelanggaran berat. Ini konyol," kata [Sebastian Salang](#) di Kantor [Formappi](#) di Matraman, Jakarta, Minggu (20/12/2015).

Langkah partai warisan Orde Baru itu, menurut Salang tidak mendidik publik. Mereka juga disebutkan tidak berniat untuk membangun kepercayaan dari masyarakat.

Salang menyatakan sebagai orang yang dinilai partai pengusung melakukan pelanggaran berat, Novanto seharusnya sudah dipecat dari keanggotaannya di parlemen. "Kalau seperti ini, Golkar jelas bela orang yang jelas langgar etik," kata Salang.

Dia juga menyebutkan, jika Novanto punya kesadaran etik seharusnya menolak saat ditawari posisi tersebut. "Ini tunjukan dia tidak punya standar etika," ucap Salang.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/12/20/formappi-anggap-konyol-langkah-golkar-tempatkan-novanto-sebagai-ketua-fraksi>

Hanya Selesaikan 7,5 Persen RUU, Kinerja DPR Dinilai Terburuk

Minggu, 20 Desember 2015 14:29 WIB

JAKARTA -- Kinerja DPR selama kurun waktu hampir satu tahun ini dinilai buruk. Pasalnya, hanya tiga dari 40 Rancangan Undang-undang Prioritas 2015 yang berhasil dikerjakan para anggota dewan ini.

Peneliti Formappi, Abdul Said mengatakan, pihaknya menilai DPR selama hampir satu tahun ini telah bekerja tanpa prestasi apapun. Justru menurut dia, DPR hanya menunjukkan tindakan tercela yang ditunjukkan sejumlah anggota dewan dan pimpinannya.

"Kemampuan legislasi DPR hanya 7,5 persen," kata Abdul dalam diskusi 'DPR Mengkhianati Kepercayaan Rakyat' di kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Minggu (20/12/2015).

Abdul pun menyayangkan, tiga RUU yang berhasil diselesaikan DPR tidak seluruhnya murni dari kerja DPR. Sebab, dua dari tiga RUU tersebut merupakan Undang-undang yang dihasilkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), yakni RUU tentang Pilkada dan RUU tentang Pemda.

"Hanya satu RUU Prioritas yang dihasilkan menjadi UU yakni tentang penjaminan. Di luar itu, DPR hanya menghasilkan 13 UU Kumulatif Terbuka," jelas dia.

Menurut dia, kinerja DPR yang hanya berhasil menyelesaikan 7,5 persen fungsi legislasinya sebagai prestasi terburuk DPR selama pascareformasi.

Peneliti Formappi lainnya, Lucius Karus menambahkan, minimnya RUU yang berhasil diubah menjadi UU oleh DPR, lantaran selama ini DPR hanya sibuk dalam melakukan rencana. Namun, tidak ada hasilnya.

"DPR itu hanya sibuk berencana saja, tetapi tidak bisa membuktikan lebih banyak, hanya satu saja yang RUU murni yang berhasil disahkan," kata Lucius.

<http://www.lampost.co/berita/hanya-selesaikan-75-persen-ruu-kinerja-dpr-dinilai-terburuk>

Kinerja DPR Buruk **Sepanjang 2015, Hanya Tiga UU yang Diselesaikan**



Lucius Karus, saat diskusi Refleksi Akhir Tahun 2015 tentang kinerja DPR, di Jakarta, Minggu (20/12). Dalam refleksi tersebut, Formappi menilai, DPR kehilangan fokus dan makin kurang beretika

JAKARTA, KOMPAS — Tahun 2015 tercatat sebagai tahun Dewan Perwakilan Rakyat dengan kinerja paling buruk. Sejak reformasi bergulir hingga saat ini, baru sekali ini lembaga perwakilan rakyat tersebut hanya mampu menuntaskan tiga undang-undang prioritas dalam waktu satu tahun.

Tahun 2015 juga diwarnai dengan pengunduran diri Ketua DPR Setya Novanto setelah terbelit kasus etik.

"Sebelumnya, yang paling buruk, DPR hanya mengesahkan delapan UU dalam setahun. Itu terjadi tahun 2014. Sekarang ini, kinerja buruk DPR sangat memprihatinkan," kata peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, Minggu (20/12), saat memaparkan setahun kinerja DPR, di Jakarta.

Abdul Sahid, peneliti Formappi lainnya, menjelaskan, 3 dari 40 Rancangan Undang-Undang Prioritas 2015, ternyata hanya satu undang-undang yang dikerjakan dengan berkeringat, yakni UU Penjaminan. Dua UU lainnya, yaitu UU No 2/2015 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, sebelumnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Ketika bulan Januari 2015 telah tercapai konsolidasi antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, kami berpikir kinerja DPR akan lebih baik. Ternyata, dari sisi kuantitas dan kualitas sangat buruk. Kemampuan legislasi DPR hanya 7,5 persen dari target," ujar Abdul Sahid.

Peneliti Formappi, Marcellianus Djadijono, pun menyoroti minimnya hasil laporan dari 40 Panitia Kerja (Panja) DPR. "Panja Kebakaran Hutan dan Kabut Asap, misalnya, tidak ada ujung pangkalnya," ucapnya. Djadijono mengatakan, anggota DPR juga tidak menjalankan Tata Tertib (Tatib) DPR terkait pelaporan hasil reses. Tatib DPR mengatur, seharusnya aspirasi rakyat diperoleh selama reses dilaporkan dalam rapat paripurna, tetapi hal itu tidak dilakukan.

Lucius pesimistis, kinerja DPR pada tahun depan bisa lebih baik. Setidaknya ini terlihat dari penyusunan RUU yang baru akan dibahas pada rapat-rapat awal tahun. "DPR jadi tidak dapat langsung tancap gas membahas RUU," ujarnya.

Pengganti Novanto

Sementara itu, proses pergantian Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) berpotensi terhambat karena dualisme kepengurusan partai berlambang beringin tersebut. Kedua kubu kepengurusan bersama-sama mengajukan nama untuk menggantikan Setya Novanto.

Kubu kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali mengajukan nama Ade Komaruddin, sedangkan kubu Munas Jakarta mengajukan Agus Gumiwang Kartasasmita. Keduanya merupakan Ketua F-PG berdasarkan versi masing-masing.

Kemarin, kubu Munas Jakarta mengadakan rapat pimpinan nasional yang dihadiri semua pengurus dewan pimpinan daerah (tingkat) provinsi dan kabupaten/kota, di Jakarta. Salah satu agendanya adalah membahas nama untuk diusulkan sebagai Ketua DPR.

"Kami minta pandangan daerah, sejauh ini rata-rata menyetujui usulan Agus Gumiwang sebagai Ketua DPR baru. Menurut rencana, usulan itu kami matangkan di internal, baru kami bicarakan dengan pihak sebelah (Munas Bali)," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Jakarta Zainudin Amali.

Secara terpisah, Wakil Ketua F-PG dari kubu Munas Bali Firman Subagyo mengatakan, komunikasi dan konsolidasi di antara kedua kubu diperlukan untuk menyelesaikan dualisme yang ikut menghambat proses pergantian Ketua DPR.

"Ke depan, kami harus berkonsolidasi. Kami sudah punya mekanismenya, dari DPP mengirim surat ke fraksi, fraksi mengirim surat ke pimpinan DPR, seharusnya selesai, tidak usah diributkan lagi," kata Firman.

(RYO/AGE)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 21 Desember 2015, di halaman 4 dengan judul "Kinerja DPR Buruk".

2015, DPR Tanpa Prestasi dan Bertindak Tercela

Senin, 21 Desember 2015 | 08:56

Jakarta – Forum Masyarakat Pemantau parlemen (Formappi) menilai sepanjang tahun 2015, DPR RI tanpa prestasi dan berperilaku serta bertindak tercelah. Penilaian ini berdasarkan fungsi-fungsi DPR baik melalui legislasi, anggaran maupun pengawasan DPR serta perilaku tercela oleh sejumlah anggota dan pimpinan DPR.

“Formappi menilai sepanjang tahun 2015, bahwa DPR telah bekerja tanpa menghasilkan prestasi dan, bahkan dengan, dicemari tindakan dan perilaku tercela oleh sejumlah anggota dan pimpinannya,” ujar peneliti Formappi Lucius Karus di Jakarta, Senin (21/12).

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, kata dia DPR hanya menghasilkan tiga dari 40 RUU Prioritas 2015. Dengan kata lain, kemampuan legislasi DPR hanya 7,5 persen. Dua UU yang dihasilkan basisnya adalah Peraturan Pemerintahan Pengganti UU (Perppu), yaitu: tentang Pilkada, dan tentang Pemda, dan hanya satu RUU Prioritas yang dihasilkan menjadi UU yakni tentang Penjaminan.

“Di luar itu, DPR menghasilkan 13 UU Kumulatif Terbuka. Ini adalah prestasi terburuk yang pernah dialami DPR pasca-Reformasi,” tandas Lucius.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, lanjut dia DPR memang menyelesaikan tugas membahas dan menyetujui (R)APBNP 2015 dan (R)APBN 2016. Namun, dia menilai tak terlihat pengaruh substantif DPR dalam tekanan-tekanannya memperjuangkan suara dan aspirasi rakyat dalam proses pembahasan dan penetapan APBNP dan APBN itu.

“Dari sisi penganggaran, DPR justru terkesan mengutamakan kepentingan sendiri melalui alokasi anggaran rumah aspirasi, pembangunan tujuh mega proyek DPR, dana pembangunan dapil, dan menaikkan tunjangan anggota DPR,” ungkapnya.

Kemudian, dia mengatakan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melakukan banyak Rapat Kerja (Raker), membentuk banyak Panitia Kerja (Panja) dan Panitia Khusus (Pansus). Demikian juga, DPR telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

“Namun, Raker menghasilkan rekomendasi lunak kepada Pemerintah; dari 40 Panja, hanya 3 Panja selesai bekerja atau 7.3 persen, dan sisanya tak jelas kerja maupun hasil-hasilnya; dan, dari puluhan ribuan temuan BPK, hanya sedikit yang ditindaklanjuti,” papar Lucius.

Sementara Peneliti Formappi lainnya M. Djadiono menilai sejumlah anggota dan pimpinan DPR

terduga dan terbukti melakukan pelanggaran etika atau Kode Etik DPR. Dia menuturkan tercatat 29 perkara melibatkan anggota, dan 2 perkara melibatkan pimpinan DPR di MKD.

“Dari 29 perkara anggota itu, MKD telah membuat keputusan terhadap 8 perkara, membatalkan 1 perkara dan tersisa 20 perkara untuk diselesaikan. Sementara dari 2 perkara pimpinan DPR, MKD memutuskan 1 perkara untuk kasus Donal Trump dan tidak memutuskan satu perkara lainnya dalam kasus Papa Minta Saham,” terang Djadijono.

Dia menilai dalam kasus “Papa Minta Saham” sejumlah tindakan dan perilaku tak layak oleh anggota dan pimpinan DPR sebagai pejabat tinggi negara dipertontonkan di hadapan publik. Bahkan Bahkan MKD yang peran, fungsi dan tugasnya adalah merawat dan menegakkan marwah, harkat dan martabat DPR, terlihat justru disalahgunakan untuk melindungi dan membentengi kepentingan-kepentingan diri dan kelompok anggota DPR.

“Kasus “Papa Minta Saham” bukti bahwa DPR telah mengkhianati rakyat, tidak bermartabat dan tercela. Sudah tidak berprestasi, DPR RI melakukan perbuatan tercela juga. Itulah potret DPR tahun 2015,” pungkas Djadijono. (YUS)

<http://www.beritasatu.com/nasional/334089-2015-dpr-tanpa-prestasi-dan-bertindak-tercela.html>

Senin, 21 Desember 20156

DPR Terburuk Pascareformasi

Hanya satu UU yang berasal dari hasil keringat DPR,
yakni RUU Penjaminan.

INDRIYANI ASTUTI

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada masa sidang I dan II menunjukkan kinerja terburuk sejak reformasi digulirkan. Bahkan, citra parlemen terpuruk karena kasus 'papa minta saham' yang dilakukan mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Demikian disampaikan Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) di Jakarta, kemarin. Peneliti Formappi Abdul Sahid menyebut capaian fungsi-fungsi utama DPR tidak banyak dihasilkan. "Kinerja DPR tidak signifikan bahkan citranya terpuruk di akhir tahun ini," katanya.

Pada masa sidang I yang berlangsung 14 Agustus-30 Oktober 2015, DPR kedodoran melaksanakan fungsi legislasi dengan menyetujui 37 RUU prioritas. Pada masa sidang kedua, di penghujung tahun 2015, DPR menambah satu RUU prolegnas prioritas, yakni *Tax Amnesty*.

"Ini tidak masuk akal. DPR hanya menghasilkan tiga undang-undang dari 40 Rancangan Undang-Undang prioritas 2015," kritiknya.

Menurut dia, dua UU yang dihasilkan berbasis peraturan pemerintah pengganti UU (perppu), yakni tentang pemilihan kepala daerah dan pemerintah daerah. Hanya satu UU dari hasil keringat DPR, yakni RUU Penjaminan. "Ini ialah prestasi terburuk DPR pascareformasi," ujarnya.

Terkait pelaksanaan fungsi anggaran, diakuinya DPR memberikan rekomendasi umum penyerapan anggaran semester II tahun 2015 dan menyetujui (R) APBN 2015 dan (R) APBN 2016. Namun, secara substantif DPR tidak memperjuangkan suara dan aspirasi rakyat.

Dari sisi anggaran, katanya, DPR justru terkesan mengutamakan kepentingannya sendiri melalui alokasi anggaran rumah aspirasi, pembangunan tujuh megaprojek penataan kompleks parlemen, dana pemba-

ngunan dapil, serta kenaikan tunjangan anggota dewan. "DPR menunjukkan nafsunya untuk kepentingan mereka," cetusnya.

Peneliti Formappi Djadidjono menambahkan untuk pelaksanaan fungsi pengawasan ada empat isu yang menonjol mewarnai masa sidang I dan II, yaitu proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemilihan komisioner Komisi Yudisial (KY), pembentukan panitia khusus Pelindo II, dan panitia kerja kebakaran hutan serta kabut asap.

"Hanya Pansus Pelindo yang merampungkan pekerjaannya dengan menghasilkan rekomendasi keras, sedangkan panja lain tidak jelas kelanjutannya," beber dia.

Minimnya kinerja berbanding lurus dengan tingginya pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota dewan. Formappi mencatat, terdapat 29 perkara melibatkan anggota dewan dan 2 perkara melibatkan pimpinan DPR.

Dari Purwakarta, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin mengatakan fungsi pengawasan DPR harus bersifat konstruktif dengan memberikan solusi dan bukan sekadar menyalahkan atau destruktif. "Itu berlaku untuk semua komisi dan alat kelengkapan dewan, termasuk MKD," kata pria yang diproyeksikan menjadi Ketua DPR.

Reshuffle kabinet

Buruknya kinerja ternyata juga dihadapi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Itu terungkap melalui survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang dilakukan PolComm Institute. Perombakan kabinet dianggap dapat menjadi solusi.

Peneliti senior PolComm Institute Afdal Makkuraga Putra mengatakan, dari 1.200 responden, 61% menginginkan *reshuffle* dalam waktu dekat. "Hanya 19,8% mengatakan tidak perlu. Sisanya 18,5% menyatakan tidak tahu," kata dia di Jakarta kemarin. (Uta/P-5)

indriyani@mediaindonesia.com



FORMAPPI berdiri atas inisiatif aktivis masyarakat peduli parlemen pada tahun 2001 dengan visi “Menuju Parlemen yang fungsional bagi penyelenggaraan demokrasi Indonesia yang menyejahterakan masyarakat.”

Misi FORMAPPI terbagi dalam dua sasaran, yaitu: memperluas dan memperkokoh kesadaran masyarakat atas perlunya Indonesia memiliki Parlemen yang fungsional bagi demokrasi Indonesia, dan mendorong Parlemen untuk memampukan dan mengembangkan diri sehingga fungsional bagi demokrasi Indonesia yang menyejahterakan masyarakat.

FORMAPPI menjalankan berbagai program. **Program Pengawasan** Parlemen adalah pemantauan berbasis data dan informasi untuk menghasilkan penilaian obyektif yang mendorong kemajuan Parlemen Indonesia. Pengawasan ditujukan kepada kinerja lembaga dan anggota Parlemen (MPR, DPR, DPD dan DPRD), dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat melalui forum seminar, diskusi publik dan penerbitan. Pengawasan berkala meliputi evaluasi kinerja DPR pada setiap masa sidang, setiap tahun dan setiap periode masa bakti. Mulai tahun 2013, FORMAPPI melakukan evaluasi kinerja setiap anggota DPR melalui program “Rapor Kinerja Anggota DPR 2009-2014.” Pengawasan juga dilakukan terhadap isu-isu kebijakan yang menjadi bagian dari fungsi-fungsi DPR, yaitu: legislasi, anggaran dan pengawasan.

Program Penelitian dilakukan untuk mendukung program Pengawasan yang berbasis fakta. Bidang-bidang penelitian yang dikembangkan meliputi penyelenggaraan peran Parlemen sebagai perwakilan rakyat, serta pelaksanaan fungsi-fungsi Parlemen. Di samping itu, perhatian diberikan pada dinamika hubungan parlemen dengan partai politik, pemerintah dan entitas-entitas masyarakat serta proses-proses yang berlangsung di balik dinamika tersebut. Beberapa hasil Penelitian FORMAPPI adalah Perbandingan RUU Pemilu 1999 dan 2004 (2005), DPR Kuasa, DPR Mangkir (2007), Membedah Kesiapan Parpol pada Pemilu 2009.

Program Advokasi merupakan langkah aksi sebagai kelanjutan dari hasil pengawasan terhadap Parlemen. Advokasi berupa kegiatan pendampingan dan pelatihan ini diberikan secara langsung kepada dan untuk penguatan kelembagaan Parlemen serta juga pemberdayaan anggota-anggota Parlemen, dan kelompok-kelompok masyarakat umumnya. Pada tahun 2007, FORMAPPI melakukan advokasi kepada DPD untuk pengembangan Rumah Aspirasi DPD. Demikian juga, pada tahun 2010 FORMAPPI memberikan pendampingan kepada empat (4) anggota DPR untuk dan dalam upaya mengembangkan model-model Rumah Aspirasi anggota DPR.

FORMAPPI menyelenggarakan **Program Pendidikan Politik** untuk memupuk pengetahuan, memperkuat dan memperluas kesadaran berparlemen di kalangan masyarakat. Pendidikan politik secara langsung dilakukan melalui kegiatan seperti pendidikan pemilih pada setiap menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu), dialog publik tentang perkembangan Parlemen Indonesia, dan penyebaran informasi tentang parlemen kepada masyarakat.

Untuk menyebarkan hasil-hasil pengawasan dan berbagai gagasan tentang pengembangan Parlemen yang fungsional bagi demokrasi Indonesia, FORMAPPI mempublikasinya melalui beberapa sarana. Pada tahun 2002, FORMAPPI menerbitkan Majalah Awasi Parlemen. Menyesuaikan perkembangan media social, dan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat luas, sejak 2013 FORMAPPI menyediakan kanal informasi seperti www.parlemenindonesia.org; Fanpage Facebook: Formappi; dan Twitter: @formappi2001.

Penerbitan buku, seminar publik, diskusi mingguan, lokakarya dan konferensi pers diselenggarakan untuk pendalaman masalah dan isu sekaligus mengembangkan wacana serta penyebaran informasi tentang keparlemenan kepada masyarakat.

Alamat Kontak: Jl. Matraman Raya No. 32 B, Jakarta Timur 13150, Indonesia. T: 021-8193324; F: 021-85912938; E:formappi@cbn.net.id; W: www.parlemenindonesia.org.